



MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/I/2015
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 73/PM.2.5/STTD-N/2013

Nomor : 019/MT/XI/2020

Jakarta, 18 November 2020

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berkantor di Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39B, Jakarta - 12940, Indonesia.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Bahwa pada hari, Rabu, tanggal 18 November 2020, bertempat di Ruang Jade Lantai 2 Hotel Park Regis Arion – Kemang, Jalan Kemang Raya nomor 7 Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12730, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut **Rapat**) dan telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk tertanggal 18 November 2020 nomor 30, dibuat oleh saya, Notaris, yang memuat keputusan-keputusan sebagai berikut:

Keputusan Agenda Pertama dan Kedua:

- I. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan Laporan Tahunan Dewan Komisaris mengenai pengawasan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.
- II. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan” anggota dari firma KPMG, dengan pendapat bahwa pernyataan keuangan wajar, dalam segala aspek material, berdasarkan Laporan Akuntan Publik tertanggal 30 September 2020, Nomor 00586/2.1005/AU.1/06/1545-2/1/IX/2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
- III. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yaitu sebesar AS\$ 1,27 juta untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

Keputusan Agenda Ketiga:

Menunjuk kembali Akuntan Publik “SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan” anggota dari firma KPMG untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut

Keputusan Agenda Keempat:

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku.



MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 73/PM.2.5/STTD-N/2013

Keputusan Agenda Kelima:

- I.** Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- II.** Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- III.** Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan agenda Rapat yang kelima ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.



MIKI TANUMIHARJA, S.H.